

ANALISIS MANAJEMEN PENDIDIKAN DI SLB NEGERI 1 LIMA KAUM

Vicky Rizki Febrian¹, Zulmuqim², Himyar Pasrizal³

¹Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Tanah Datar

^{2,3} Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Sumatera Barat

e-mail: vickyrizkifebrian@gmail.com, zulmuqim@gmail.com, himyarpasrizal@iainbatusangkar.ac.id



Abstract: *This study aims to determine the application of management aspects of education in: (1) personnel and student management, (2) curriculum management, and (3) infrastructure management in Lima Kaum 1 SLB. This research is qualitative research with a case study method. Data collection techniques used are: Observation, Interview Method and Documentation. The results of the study revealed: (1) in staffing and student management, it was found that the implementation of management had been carried out in terms of routine activities, but there were still a number of things that had to be corrected namely in terms of organization, function of school leaders and businessmanship, it was found that the school had made every effort in implementing the 2013 Curriculum, but still needed proper and accurate management in its implementation at school and the development of a typical school curriculum so as to improve school quality, (3) in the management of facilities and infrastructure found that administrative management in the procurement of infrastructure facilities it is good, but still needs improvement in terms of planning procurement of facilities that are right on target and management of existing infrastructure.*

Keywords: *Manajemen, Pendidikan,*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap orang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara yang ada di seluruh dunia. Dengan adanya pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia yang berkualitas, mandiri dan tentunya berguna bagi kemajuan bangsa dan negara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang

ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Hasballah, 2009: 2).

Lebih lengkap Hasballah (2009: 2) mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia

menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, pemerintah dan masyarakat. Dari ketiga lingkungan pendidikan tersebut, lingkungan pendidikan sekolah merupakan salah satu dari tiga jenis lingkungan pendidikan yang saat ini menjadi sarana atau tempat populer bagi sebagian besar orang dalam menuntut ilmu. Pelaksanaan pendidikanpun harus adil dan merata sesuai dengan prinsip EFA (*Education for All*), yakni mewujudkan pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, pendidikan adalah hak Warga Negara tanpa kecuali baik berupa pendidikan formal maupun non formal. Hal tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal 31.

Pada hakekatnya "*Education for All*" merupakan upaya agar setiap warga negara dapat memenuhi haknya, yaitu layanan pendidikan. Pembelajaran untuk semua merupakan wujud pembelajaran yang

menyangkut semua usia entah itu dewasa, orang tua maupun anak-anak yang bertujuan agar lebih mengerti tentang sesuatu, karena pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi dalam diri manusia.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel) seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31, namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat.

Hak untuk mendapatkan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tertera dalam UU No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (2) berbunyi: Warga Negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Supamo (2007: 1) menyatakan anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis karakteristiknya, yang membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Adanya undang-undang dan regulasi yang mengatur tentang Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah

Luar Biasa (SLB) merupakan suatu tindakan yang sangat tepat, karena kita tentu tidak akan mampu memprediksikan apakah ada atau tidaknya anak-anak ABK dimasa depan, kalau ditinjau dari beberapa tahun belakang, keberadaan anak-anak ABK selalu ada di tiap-tiap daerah.

Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terselenggara di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang bertujuan untuk membantu ABK dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sesuai dengan PP. No 72 Tahun 1991 Pasal 2 yang berbunyi : Pendidikan luar biasa bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Namun program SLB yang mengacu kepada PP. No 72 Tahun 1991 tersebut mengalami kendala. Istiningsih menyatakan bahwa pendidikan bagi anak yang ber-kelainan diselenggarakan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Lokasi SLB pada umumnya berada di Ibu Kota Kabupaten. Akibatnya sebagian anak-anak berkelainan, karena faktor ekonomi terpaksa tidak disekolahkan oleh orang tuanya karena lokasi SLB jauh dari rumahnya, sedangkan SD terdekat tidak bersedia menerima karena tidak mampu melayaninya. Selain hal tersebut, kurang efektifnya manajemen pendidikan yang diterapkan di SLB juga sangat mempengaruhi proses rendahnya mutu pendidikan ABK (Istiningsih, 2005: 12-13)

Tujuan manajemen pendidikan di SLB erat sekali kaitannya dengan tujuan

pendidikan secara umum, karena Manajemen pendidikan pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Adapun tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun tujuan tersebut sangatlah sulit untuk dicapai jika prosesnya tidak dilakukan secara tepat apalagi di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Berdasarkan dari beberapa Permasalahan di atas, ternyata telah ada yang melakukan penelitian sebelumnya, salah satu contoh yang telah mengangkat beberapa permasalahan di atas dalam bentuk penelitian adalah penelitian Tesis dari Umi Maisaroh tahun (2010) yang berjudul: Manajemen Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa C Yayasan Pendidikan Asuhan Luar Biasa (SLB-C YPAALB) Prambanan, Kab. Klaten Tahun 2010, penelitian ini memiliki rumusan masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana pelaksanaan manajemen penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa C (SLB-C) YPAALB Prambanan, Kab. Klaten? dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan manajemen penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa C (SLB-C) YPAALB Prambanan, Kab. Klaten.

Berdasarkan hasil penelitian Umi Maisaroh tahun (2010) ditemukan bahwasanya Proses penyusunan kurikulum sudah didasarkan atas asumsi-asumsi yang didukung realitas empirik di lapangan, yaitu adanya kerja sama dan relevansi dengan kebutuhan pelanggan terutama siswa, sehingga pendidikan yang diselenggarakan

Sekolah Luar Biasa C (SLB-C) YPAALB Prambanan, Kab. Klaten sesuai dengan konteks atau mempunyai nilai relevansi yang dapat memuaskan siswa. Sedangkan kegiatan proses belajar mengajar dalam bentuk tatap muka sudah dimanfaatkan secara optimal, dan adanya kecenderungan budaya yang berorientasi pada kualitas yang dilakukan baik oleh siswa maupun guru, seperti adanya kedisiplinan dalam menggunakan alokasi waktu yang sudah terstruktur, untuk kegiatan tatap muka.

Kualitas guru (kompetensi akademik) dalam hasil penelitian tersebut dijelaskan sudah sesuai dan seimbang dengan jumlah siswa yang diterima dari tahun ke tahun. Keadaan tersebut mengakibatkan banyaknya guru yang mengajar mata pelajaran tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya bahkan guru selalu berpenampilan rapi, bersih, dan indah dalam melayani siswa sehingga dapat memuaskan siswa, dan telah menggunakan alat peraga ketika proses belajar mengajar melalui tatap muka dan menggunakan alat bantu yang mempunyai kontribusi langsung untuk kualitas proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan dalam arti kuantitas (hanya ada beberapa peralatan yang belum cukup dari segi jumlah) maupun kualitas (kesesuaian dan kemanfaatan), sehingga pemanfaatan alat bantu tersebut tidak hanya sebagai formalitas tetapi sudah mampu menunjang efektivitas kegiatan kurikuler, terutama pada proses pembelajaran sehingga dapat memuaskan siswa Berdasarkan permasalahan dan Penelitian yang relevan tersebut di atas maka Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat penelitian yang berjudul “Analisis Manajemen Pendidikan di SLB Negeri 1 Lima Kaum”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang dihasilkan berupa data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Agar sasaran penelitian yang diterapkan dapat tercapai dengan baik, maka dalam metode ini diperlukan langkah-langkah yang sistematis, terencana dan sesuai dengan kaidah keilmuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Peneliti memilih penelitian studi kasus karena penelitian studi kasus karena penelitian studi kasus berusaha menggambarkan proses manajemen pendidikan yang ada dan tindakan-tindakan manajemen pendidikan secara khusus di SLB Negeri 1 Lima Kaum. Teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, lalu menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang meliputi Kepala Sekolah SLBN 1 Lima Kaum, Wakil Kepsek, Pejabat Pemegang Barang, Guru, Siswa, Wali Murid, Pemda Tanah Datar dan Masyarakat sekitar. Triangulasi yang akan Peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu suatu teknik pengecekan suatu kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber.

Penelitian harus valid, maka data dan dokumen yang diperoleh perlu diperiksa keabsahannya. Keabsahan data merupakan

konsep keasliannya (validitas) dan keandalannya (reabilitas). Menurut teori “positivisme” yang disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Menurut Moloeng (2006: 324) pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Empat kriteria yang digunakan derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif yaitu: (1) Reduksi Data, reduksi data ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Caranya antara lain melalui seleksi data yang ketat menggolongkan dalam pola yang lebih luas. (2) Penyajian data, pada tahap ini, peneliti menunjukkan data dan membandingkan antara data-data yang telah terkumpul tersebut dengan data yang sesuai dengan penelitian. Dengan cara ini diharapkan akan mempermudah penarikan kesimpulan, pengambilan verifikasi atau bisa melengkapi data yang masih kurang melalui pengumpulan data tambahan dan reduksi data. (3) Verifikasi Data, peneliti mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukannya dan kemudian data tersebut perlu diverifikasi. Analisis data kualitatif ini merupakan upaya berulang terus menerus dan terjalin hubungan yang saling terkait antara kegiatan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Jika kesimpulan yang diambil masih kurang maka dilakukan pengumpulan data tambahan yang dianalisis melalui rangkaian kegiatan yang sama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Manajemen Kepegawaian dan kesiswaan di SLB Negeri 1 Lima Kaum

Gaffar (1989) mengemukakan bahwa Manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang.

Menurut E. Mulyasa Manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan tersebut mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actualizing*) dan pengawasan (*controlling*), sebagai suatu proses untuk menjadikan visi menjadi aksi.

Manajemen pendidikan merupakan suatu proses atau sistem pengelolaan organisasi dan peningkatan kemanusiaan dalam kaitannya dengan suatu sistem pendidikan. Kegiatan pengelolaan pada suatu sistem pendidikan bertujuan untuk keterlaksanaan proses belajar mengajar yang baik yang mencakup program kurikulum yang meliputi administrasi kurikulum, metode penyampaian, sistem evaluasi, sistem bimbingan, Program ketenagaan, Program pengadaan dan pemeliharaan fasilitas dan alat-alat, pendidikan, Program pembiayaan dan Program hubungan dengan masyarakat.

Pendekatan sistem dalam manajemen pendidikan sebagai akibat dari dianutnya pendekatan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah suatu kesatuan dari berbagai unsur yang satu dengan yang

lainnya saling berhubungan dan bergantung di dalam mengemban tugas untuk mencapai tujuan sistem tersebut. (Oemar Hamalik, 2007: 78).

Sedangkan Personalia berasal dari bahasa asing yaitu *personnel*, maksudnya golongan dari masyarakat yang penghidupannya dilakukan dengan bekerja dalam kesatuan kerja pemerintah atau swasta. Di sekolah dasar, personalia adalah semua karyawan yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar, yaitu kepala sekolah, guru kelas, guru bidang studi, dan lain-lain (Asmendra, 2012). Manajemen personalia mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksana, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah dasar. Kegiatan mengatasi ketenagaan edukatif dan non edukatif ini mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan ketenagaan dengan menyajikan arus dokumen yang terdapat pada setiap tindakan dan kegiatan dalam bidang ketenagaan (Eka Prihatin:2011).

Dalam proses Manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pemimpin (Kepala Sekolah), yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), Penggerakkan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

Sedangkan Manajemen kesiswaan adalah proses pengelolaan kegiatan dari hal-hal yang berhubungan dengan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Manajemen Kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa, pembinaan sekolah mulai dari penerimaan siswa, pembinaan

siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya mulai penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif (Manja:2017).

Mulyono (2008) mengemukakan bahwa manajemen kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang di rencanakan dan di usahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh siswa (dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan) agar dapat mengikuti proses PBM secara efektif dan efisien.

Manajemen kesiswaan juga berarti seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinyu terhadap seluruh peserta didik (dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan) agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah (Gunawan:1996).

Secara umum tujuan manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur serta dapat mencapai tujuan pendidikan sekolah (Mulyasa:2007).

kegiatan administrasi siswa dapat didaftar melalui gambaran bahwa lembaga pendidikan diumpamakan sebuah transformasi, yang mengenal masukan (*input*). Pengelolaan didalam transformasi (*proses*) dan keluaran (*output*). Dengan demikian penyajian penjelasan administrasi siswa dapat diurutkan menurut aspek-aspek tersebut. Dengan melihat pada proses memasuki sekolah sampai murid meninggalkan sekolah, terdapat 4 (empat) kelompok pengadministrasian yaitu: (1) penerimaan

murid, (2), pencatatan prestasi belajar (3) pencatatan bimbingan dan penyuluhan serta (3).Monitoring (Arikunto: 2008).

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan ditemukan bahwasanya SLB Negeri 1 Lima Kaum belum bisa mengikuti baik Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 Tentang Penerimaan Siswa Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah yaitu dengan jumlah maksimal siswa pada setiap rombongan belajar adalah 8 siswa untuk seluruh jenjang yang ada di sekolah tersebut maupun Keputusan Kepala Badan Kepegawai Negara Nomor 19 Tahun 2011. Namun sudah ada usaha untuk melaksanakan hal-hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh bapak Iriyandi,S.Pd (2018) “kami akan coba untuk melaksanakan manajemen kepegawaian dan kesiswaan secara baik dan menyeluruh”.

Dengan membagi secara merata beban mengajar setiap guru dalam satu minggu sebanyak 24 jam tatap muka ketersediaan tenaga pendidik secara kuantitas menunjukkan bahwa SLB Negeri 1 Lima Kaum memiliki ketersediaan tenaga pendidik yang masih terbatas karena berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ramsida S.Pd beliau menjelaskan bahwa guru untuk tunagrahita Masih kurang dan setiap guru wajib mengajar diseluruh tingkatan SD LB sampai dngan SMA LB (SLB) padahal kita ketahui bahwa selain tingkatan kelas berbeda dan ABK juga berbeda-beda. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah guru yang tersedia adalah sebanyak 21 orang yang aktif dan 1 orang sudah mengundurkan diri sebagai honorer padahal yang diajarkan adalah siswa SD sampai dengan SMA LB yang berjumlah 132 siswa. Ketersediaan tenaga pendidik di sekolah tersebut masih belum terpenuhi sebanyak 21 tenaga

pendidik belum mampu mengikuti aturan tersebut diatas secara maksimal.

Apabila dilihat di lapangan, seluruh guru yang ada di sekolah tersebut belum dapat menangani seluruh rombongan belajar yang ada secara maksimal, karena waktu peneliti mengamati kegiatan belajar banyak siswa yang keluar masuk baik yang SD, SMP maupun SMA, begitu juga kalau dilihat dari pencapaian tujuan pembelajaran ketersediaan tenaga pendidik di sekolah tersebut masih kurang. Hal ini dikarenakan jumlah guru yang ada belum sesuai dengan jumlah maksimal siswa dalam setiap rombel untuk jenis sekolah berkebutuhan khusus. Sehingga siswa berkebutuhan khusus tersebut kurang maksimal dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, karena jumlah siswa dalam satu kelas melebihi batas maksimal.

Hal tersebut di atas disebabkan oleh PNS yang ada di sekolah tersebut berjumlah 16 guru, dan 7 guru lainnya masih bersifat guru honorer sedangkan yang jumlah peserta didik ada sebanyak 132 siswa yang ABK-nya beragam. Ketersediaan tenaga pendidik merupakan salah satu langkah awal untuk menganalisis manajemen tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut. Setelah ketersediaan tenaga pendidik diketahui maka jumlah tenaga pendidik yang dibutuhkan sekitar 9 lagi untuk guru yang berlatar belakang pendidikan ABK karena total guru yang dibutuhkan minimal 26 guru yang berlatar belakang pendidikan ABK.

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SLB Negeri 1 Lima Kaum menunjukkan bahwa terdapat 18 guru yang memiliki pendidikan terakhir Strata 1 (S1), sedangkan 2 guru memiliki pendidikan terakhir SMA dan terdapat 1 orang guru yang pendidikan terakhirnya S2.

Untuk relevansi latar belakang pendidikan, sebahagian besar guru di SLB Negeri 1 Lima Kaum memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang tugas yang mereka ampu namun butuh peningkatan kualitas dan kinerja diantara guru ataupun tenaga pendidik dalam proses pembelajaran dengan manajemen yang baik. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Iriyandi, beliau menjelaskan mengenai proses manajemen kesiswaan dan kepegawaian bahwasanya beliau telah membuat peraturan tentang kedisiplinan dan manajemen efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Peneliti menemukan bahwasanya di SLBN 1 Lima Kaum sudah memiliki struktur organisasi, namun masih belum maksimal pelaksanaannya dalam organisasi diantara guru-guru di sekolah, padahal di SLB Negeri 1 Lima Kaum yang merupakan sekolah terpadu gabungan dari tingkat SD sampai SMA. Walaupun ada struktur, jika tidak dijalankannya peran dalam struktur tersebut tentu organisasi yang dibentuk akan sia-sia mengingat perannya yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan sekolah. Hal ini peneliti ketahui melalui wawancara dengan Ibu Ramsidah, S.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah, beliau menjelaskan bahwasanya struktur yang ada di SLB Negeri 1 Lima Kaum tidak diakui jamnya di Propinsi Sumatera Barat, oleh sebab itu struktur di organisasi di SLB tersebut tidak jalan, selain itu tenaga kependidikan yang sangat penting yaitu seorang Tata Usaha (TU) tidak ada untuk tahun ajaran ini.

Berdasarkan struktur kepemimpinan di SLBN 1 Lima Kaum ini, peneliti melihat bahwasanya masih banyak yang harus

diperbaiki terutama tentang manajemen sekolah, seharusnya peran TU yang sangat urgensi jangan dibiarkan kosong dalam waktu tertentu, jika TU yang lama sudah mengundurkan diri yang disebabkan oleh hal-hal tertentu, hendaknya Kepala Sekolah dengan cepat mencari penggantinya baik berbetuk Plt maupun Pj sementara. Jika kekosongan jabatan TU ini berlangsung lama maka tentu kedepannya proses manajemen kepegawaian, kesiswaan dan proses administrasi akan terganggu dan pelaksanaan proses pendidikan SLBN 1 Lima kaum tidak akan maksimal.

Kekosongan jabatan TU tersebut menurut informasi yang penulis terima dari beberapa guru sudah berlangsung selama semester genap tahun 2017/2018. Selama itu pulalah kebijakan manajemen Sekolah dipertanyakan. Seharusnya Kepala Sekolah sudah punya konsep skala prioritas mengingat peran TU sangat penting.

Selama ini tugas TU di sekolah SLBN 1 Lima kaum (Iriyandi: 2018) adalah menulis surat, membaca, menyalin (menggandakan), menghitung, memeriksa, memilah (menggolongkan dan menyatukan), menyimpan dan menyusun indeks dan melakukan komunikasi (lisan dan tertulis).

Begitu juga dengan fungsi TU di sekolah SLBN 1 Lima kaum adalah menangani urusan administrasi yg dibagi menjadi 4 bagian: *School assistant*, *Clerical assistant*, *Finance assistant* dan *General assistant*.

Manajemen Kurikulum di SLB Negeri 1 Lima Kaum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pendidikan tertentu. Kurikulum juga merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar, baik dalam ruangan kelas maupun diluar sekolah (Asmendri, 2012).

Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematis, dan sistemik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks kurikulum yang sesuai dengan tingkatan ataupun jenis pendidikan yang berlangsung (Asmendri: 2012).

Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum adalah: a) produktivitas, b) demokratisasi, c) kooperatif, d) efektif dan efisiensi dan e) mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Adapun fungsi dari manajemen kurikulum adalah: a) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, b) meningkatkan keadilan, c) meningkatkan relevansi dan efektivitas, d) meningkatkan efektivitas kinerja guru dan aktifitas siswa dalam proses pembelajaran, e) meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar dan f) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kurikulum (Asmendri: 2012).

Manajemen kurikulum di SLBN 1 Lima Kaum dilakukan secara bertahap. Hal tersebut dilakukan berdasarkan peraturan dari Dinas Pendidikan. Adapun tahap-tahap tersebut, menurut Ibu Ramsidah, S.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah membidangi kurikulum (Ramsidah, 2018) adalah sebagai berikut: Pertama, untuk kelas I dan kelas X11 sudah sekitar tiga tahun menggunakan kurikulum 2013. Semenjak kurikulum 2013 di sahkan oleh Dinas Pendidikan, maka

secara otomatis SLBN 1 Lima Kaum menggunakan kurikulum 2013 dengan melakukan percobaan di kelas ganjil. Kedua, kemudian untuk penggunaan kurikulum 2013 pada kelas ganjil sudah berjalan sekitar dua tahun. Ketiga, untuk kelas genap penggunaan kurikulum 2013 baru berjalan sekitar enam bulan, mulai diterapkannya kurikulum 2013. Untuk penggunaan kurikulum 2013 ini, tentunya masih banyak hal-hal yang perlu dievaluasi mulai dari evaluasi secara tertulis, dari segi buku, dan isi.

Hal tersebut dilakukan karena kelas SLBN 1 Lima Kaum tergolong baru menggunakan kurikulum 2013, maka sistem evaluasi tersebut sangat perlukan guna untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Keempat, untuk kelas X11 tidak atau belum menggunakan kurikulum 2013. Hal tersebut dikarenakan khususnya untuk kelas X11 sistem evaluasinya (Ujian Nasional) masih menggunakan kurikulum 2006 dan pemerintah tidak atau belum memfasilitasi soal UN menggunakan kurikulum 2013, selain itu beliau juga menjelaskan bahwasanya kurikulum yang diterapkan pada siswa umumnya diberikan kurikulum yang tingkatannya 1 kelas dibawahnya, seperti untuk kurikulum kelas XI yang dijarakan adalah kurikulum kelas X begitu juga dengan yang lainnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di SLBN 1 Lima Kaum bahwasannya di SLBN 1 Lima Kaum belum sepenuhnya melakukan penyesuaian untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan terhadap ABK dalam setting pendidikan SLB. Struktur kurikulum SLB adalah beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama satu semester.

Manajemen Sarana dan Prasarana di SLB Negeri 1 Lima Kaum

Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan (Baharuddin, dkk: 2010). Manajemen sarana dan prasarana pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana dapat juga diartikan sebagai kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran (Prihatin: 2011).

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai (Heryati dan Muhsin: 2014)

Sarana dan prasarana pendidikan sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar. Untuk memenuhi desain pembelajaran yang berkualitas dan kondusif atau fasilitas belajar yang beragam seperti gedung atau ruangan kelas, media atau alat bantu pelajaran, perpustakaan, laboratorium, bahan praktik, alat-alat olah raga dan lain sebagainya. Semua merupakan bagian dari sarana dan prasarana pendidikan.

Berikut Peneliti mengemukakan pengertian sarana menurut para ahli: Ibrahim Bafadal mengatakan bahwa sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara

langsung digunakan di dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan (Bafadal, 2003).

Imam Musbikin mengatakan bahwa secara etimologis sarana pendidikan merupakan alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan prasarana pendidikan berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Mulyasa sarana pendidikan adalah fasilitas yang secara langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran (Musbikin: 2013).

Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan adalah semua perangkat, fasilitas, bahan, alat maupun perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran guna untuk menunjang jalannya proses pembelajaran tersebut. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat, fasilitas, bahan, alat maupun perabot yang secara tidak langsung digunakan dalam proses pembelajaran guna untuk menunjang proses pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang kami temukan bahwasanya menurut Bapak Danar Widyanugroho, S.Pd selaku Pengurus barang di SLBN 1 Lima Kaum, beliau menerangkan bahwasanya dalam pelaksanaan manajemen sarana prasarana yang ada sudah dilakukan sesuai anjuran dari Provinsi. Beliau juga menjelaskan bahwasanya semua aset sarana prasarana yang ada berasal dari Provinsi dan beliau garis bawahi tidak ada dari pihak Pemda Tanah Datar. Bahkan dalam pelaksanaan

pengadaan barang langsung dari Provinsi. Untuk belanja modal tahun 2017 hanya sekitar Rp.26.228.374 dengan dana sebanyak itu tentu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang akan di gunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran di SLBN 1 Lima Kaum. Contoh sarana yang kurang adalah alat bantu dengar bagi siswa ABK Tuna Rungu, Tulisan Braille untuk siswa Tuna Netra.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Danar Widyanugroho, S.Pd tersebut selain masih kurangnya sarana prasarana peneliti juga melihat banyaknya sarana prasarana yang belum dimanfaatkan secara maksimal contoh untuk ABK tipe C, kurang dimanfaatkannya prasarana pembelajaran seperti sensor motorik, plastisin yang membantu proses pembelajaran bagi anak tuna grahita, begitu juga dengan sarana kesenian seperti dram band, lapangan bola takraw, basket dan ruangan kesenian, padahal sarana prasarana tersebut sangat mendukung proses pembelajaran siswa. Selain itu peneliti juga melihat bahwasanya ditemukan sarana prasarana yang tidak mendukung proses pembelajaran, seperti tempat panjat bermain yang biasanya di pakai oleh anak TK padahal seharusnya setiap sarana prasarana yang ada harus menunjang proses pembelajaran dan dimenej sedemikian rupa supaya bermanfaat sevara maksimal.

Proses pembelajaran di sekolah akan dipengaruhi oleh banyak hal antara lain: guru, siswa, tujuan, lingkungan dan kurikulum yang didalamnya memuat materi, metode, dan cara evaluasi. Salah satu aspek yang mendapat perhatian utama oleh setiap administrator pendidikan adalah sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karena itu, agar semua sumber daya yang ada terutama yang

berupa alat atau media dapat bermanfaat semaksimal mungkin, maka perlu adanya upaya pengelolaan atau manajemen terhadap sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam manajemen sarana dan prasarana yang penulis temukan di SLBN 1 Lima Kaum terdapat tiga komponen pengelolaan sarana dan prasarana dimana pengolahan ini membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Komponen tersebut yaitu:

- a. *Site* (lahan bangunan)
- b. *Building* (gedung sekolah)
- c. *Equitment* (perlengkapan sekolah)

Berdasarkan pengamatan peneliti dan wawancara dengan Bapak Danar (2018) semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi terhadap jalannya proses pendidikan, dan Pengelolaan sudah meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan.

Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Bapak Danar Widyanugroho, S.Pd menjelaskan Proses manajemen sarana dan prasarana di SLBN 1 Lima Kaum diawali dengan perencanaan. Proses perencanaan dilakukan untuk mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan di sekolah. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan merupakan pekerjaan yang kompleks, karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional, regional dan lokal. Perencanaan ini merupakan sistem perencanaan terpadu dengan perencanaan pembangunan karena di SLBN 1 Lima Kaum meliputi SD, SMP dan SMA. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tergantung pada jenis program pendidikan dan tujuan

yang ditetapkan. Perencanaan ini mencakup perencanaan pengadaan belanja modal baik perencanaan pengadaan bangunan, perencanaan pembangunan bangunan, dan perencanaan pengadaan perabot dan maupun perlengkapan sekolah.

Langkah-langkah perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan di sekolah SLBN 1 Lima Kaum menurut Bapak Kepala Sekolah SLBN 1 Lima Kaum Bapak Iriyandi, S.Pd adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis kebutuhan pendidikan di SLBN 1 Lima Kaum dengan menetapkan program untuk masa yang akan datang sebagai dasar untuk mengevaluasi keberadaan fasilitas dan membuat model perencanaan perlengkapan yang akan datang (RAB).
- 2) Melakukan survei ke seluruh unit sekolah SLB terutama yang ada di Kabupaten Tanaj Datar untuk menyusun "*master plan*" untuk jangka waktu tertentu upaya pembeda dengan SLB lainnya
- 3) Memilih kebutuhan utama berdasarkan hasil survey tersebut.
- 4) Mengembangkan *educational specification* untuk setiap proyek yang terpisah-pisah dalam usulan "*master plan*".
- 5) Merancang setiap proyek yang terpisah-pisah sesuai dengan spesifikasi pendidikan yang diusulkan dan dibentuk kepanitian, jika pengadaan bersifat langsung maka dibuatkan SPK dengan Rekanan, jika tender diatas 200 juta maka di buka tender dan buat tim atau diminta tim dari provinsi untuk membantu proses pengadaan sarana prasarana di SLBN 1 Lima kaum
- 6) Mengembangkan atau mengutamakan tawaran atau kontrak dan melaksanakan sesuai dengan gambaran kerja yang diusulkan.

- 7) Melengkapi perlengkapan gedung dan meletakkannya sehingga siap untuk digunakan.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Proses berikutnya menurut Bapak Kepala Sekolah SLBN 1 Lima Kaum Bapak Iriyandi, S.Pd adalah pengadaan yang merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Pengadaan dilakukan sebagai bentuk realisasi atas perencanaan yang telah dilakukan. Tujuannya untuk menunjang proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam kaitan pengadaan perlengkapan sekolah, ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pengelola perlengkapan sekolah untuk mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan sekolah, anatara lain dengan cara membeli, mendapatkan, hadiah atau sumbangan, tukar-menukar, dan meminjam.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana merupakan penunjang proses belajar mengajar siswa. Sementara itu, sarana dan prasarana akan mengalami penyusutan kualitas dari waktu ke waktu. Sarana Prasarana tersebut kondisinya tidak akan tetap tetapi lama-kelamaan akan mengarah pada kerusakan dan kehancuran bahkan kepunahan (Danar, 2018). Baik kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana pendidikan akan menurun jika tidak dilakukan upaya pemeliharaan secara baik. Namun agar sarana prasarana tersebut tidak cepat rusak atau hancur diperlukan usaha pemeliharaan

yang baik dari pihak pemakainya. Maka di RAB ada anggaran Beban Penyusutan dan dari data rekonsiliasi sebagai ditemukan adanya dana sebesar Rp. 2.227.991,50 untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.

Kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan namun tidak mencukupi dengan dana sebesar itu (Danar, 2018) Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan jika dana pemeliharaan sarana prasarana kurang maka akan sulit kita untuk menjaga dan merawat sarana prasarana yang telah ada, jika ditanya apakah dana sebanyak ini cukup tentu kami menjawab bahwa dana ini tergolong belum cukup.

Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Proses terakhir menurut Bapak Kepala Sekolah SLBN 1 Lima Kaum Bapak Iriyandi,S.Pd adalah proses penghapusan, yang merupakan kegiatan menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris. Barang-barang yang ada di SLBN 1 Lima Kaum, terutama yang berasal dari pemerintah tidak akan selamanya bisa digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, hal ini karena rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, barang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan. Dengan keadaan seperti di atas maka barang-barang tersebut harus segera dihapus untuk membebaskan dari biaya pemeliharaan dan

meringankan beban kerja inventaris dan membebaskan tanggung jawab lembaga terhadap barang-barang tersebut seperti kursi dan meja yang sudah tak layak pakai lagi bahkan tak bisa di perbaiki lagi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan mengenai manajemen pendidikan di SLB Negeri Lima Kaum dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: peroses manajemen pendidikan sangat penting diperhatikan dalam menjalankan proses pendidikan terutama di SLBN 1 Lima Kaum, untuk itu seorang menejer harus bijaksana dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, penelitian yang Penulis lakukan di SLBN 1 Lima Kaum mengenai analisis manajemen pendidikan sekolah luar biasa di SLBN 1 Lima kaum. Ada beberapa indikator manajemen pendidikan sekolah luar biasa yang peneliti fokuskan yaitu ditemukan data penelitian sebagai berikut:

1. Manajemen kepegawaian dan manajemen kesiswaan

Berdasarkan data yang peneliti temukan SLB Negeri 1 Lima Kaum sudah melaksanakan poroses manajemen kepegawaian dan kesiswaan, hal ini dibuktikan dengan adanya pelatihan/ diklat yang diberikan setiap tahunnya dan sudah adanya keputusan ataupun aturan –aturan yang disiplin dalam pengelolaan kepegawaian ataupun kesiswaan, meskipun demikian banyak hal yang harus diperbaiki di SLBN 1 Lima Kaum, seperti masalah Tata Usaha yang belum juga ada sampai tanggal 1 Novembar 2018, seharusnya

ini diprioritaskan karena fungsinya yang sangat penting dalam membantu manajemen kepegawaian dan siswa di SLBN 1 Lima Kaum, mengaktifkan kembali organisasi yang ada dan mengusahakan tidak adanya rangkap jabatan di suatu jabatan kependidikan.

2. Manajemen kurikulum

Kurikulum yang diterapkan di SLBN 1 Lima Kaum dari SD s/d SMA mayoritas sudah menggunakan Kurikulum 2013, umumnya guru sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kurikulum 2013 dengan semaksimal mungkin, namun sayang pelaksanaannya masih belum sesuai dari yang apa diharapkan, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwasanya setiap jenjang pendidikan baik SD maupun SMA kurikulum yang diterapkan untuk anak SLBN 1 Lima Kaum diturunkan 1 tingkatan seperti untuk anak kelas 5 SD kurikulum yang digunakan adalah kurikulum untuk anak kelas 4 SD, begitu juga dengan SMP dan SMA-LB, sulitnya proses pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah baik dari pihak siswa maupun guru dan kurangnya buku tentang kurikulum 2013 diberbagai tingkatan ABK siswa. Tentunya hal ini akan bisa di atasi jika manajemen kurikulum diterapkan seperti mengembangkan kurikulum khas sekolah dengan tidak mengurangi kurikulum yang di standarkan secara nasional.

3. Manajemen Sarana dan Prasarana

Perencanaan ataupun pengadaan Sarana dan prasarana di SLBN 1 Lima Kaum sudah dimenej secara maksimal oleh satu orang pemegang barang, namun masih terdapat beberapa hal yang harus dioptimalkan fungsi dari

sarana yang ada seperti masih peneliti menemukan sarana yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, contoh ruang kesenian, ruang pramuka, lapangan olah raga, alat peraga dll. Selain itu sarana yang ada juga tidak relevan dengan kebutuhan siswa karena tingkatan jenjang pendidikan yang berbeda-beda adanya SD s/d SMA. Meskipun manajemen secara administrasi pengadaan suatu sarana baik, namun jika pengelolaan fungsi sarana tersebut kurang maksimal dikelola, maka sarana yang ada akan sia-sia. Tentu peran berbagai pihak sangat membantu untuk memaksimalkan fungsi sarana yang ada yang tentunya tidak akan maksimal dengan dikelola oleh satu orang saja.

Saran

Peneliti menyarankan baik kepada Kepala Sekolah SLBN 1 Lima Kaum, guru, pegawai, siswa, Pemda, dan masyarakat ataupun wali murid untuk menjunjung tinggi sikap konsistensi dan tegas dalam menjalankan Visi dan Misi sekolah SLBN 1 Lima Kaum yang sudah disepakati, agar anak ABK yang sekolah di SLBN 1 Lima Kaum nyaman dalam menjalankan proses pendidikan. Dan peneliti juga menyarankan kepada seluruh personel Sekolah SLBN 1 Lima Kaum untuk segera merekomendasikan seseorang untuk menjadi TU di SLBN 1 Lima Kaum supaya proses administrasi di Sekolah berjalan dengan baik dan lancar, serta kurikulum yang diterapkan relevan dengan apa yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia, untuk sarana prasarana hendaknya dikelola dengan baik seefisien mungkin dan jika ada perencanaan untuk pengadaan, maka lanjutkan sesuai dengan tahapan yang

dijelaskan oleh Kepala Sekolah kepada peneliti namun untuk masukannya berada pada tahapan evaluasi perlu ditingkatkan dan gunakan skala prioritas supaya sarana prasarana yang akan diadakan relevan dengan kebutuhan siswa untuk menunjang mutu pendidikan di SLBN 1 Lima Kaum.

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang manajemen pendidikan. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan manajemen pendidikan maupun agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam kajian manajemen pendidikan.

KEPUSTAKAAN ACUAN

- Asmendri. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah/ Madrasah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2012
- Bafadal. Ibrahim. 2003. *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- E. Mulyasa. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi Dan Implimentasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Hasbullah. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Umum dan Agama Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Kemenkuham. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah*
- Kemenkuham. 2008. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 Tanggal 23 Juni 2008 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)*.
- Kemenkuham. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/Pmk.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*.
- Kemenkuham. 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Kemenkuham. 1991. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa*.
- Kemendiknas. 2002. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta: Depdiknas
- Mulyasa. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, Jogjakarta: AR-Ruzz Media Groups
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Musbikin, Imam. 2013. *Menjadi Kepala Sekolah yang Hebat*, Pekanbaru: Zanafa
- PP. No 72 Tahun 1991 Pasal 2
- Prihatin. Eka. 2011. *Teori Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:

Rineka Cipta

Suharsimi Arikunto. 2008. *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: aditya Media

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI (Pendidikan), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI 2006

W.Manja. 2007. *Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Malang: Elang Mas